



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
9. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
12. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

13. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
14. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.
16. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

## BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah, tipe A;
- b. Sekretariat DPRD, tipe A;
- c. Inspektorat, tipe A;
- d. Dinas tipe A terdiri atas :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
  4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
  5. Dinas Sosial;
  6. Dinas Tenaga Kerja;
  7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
  12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  13. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
  14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  15. Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
  16. Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Dinas tipe B, terdiri atas :
  1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2. Dinas Perhubungan; dan
  3. Dinas Pariwisata.
- f. Badan tipe A, terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- g. Kecamatan tipe A, terdiri atas :
1. Kecamatan Ciamis;
  2. Kecamatan Cikoneng;
  3. Kecamatan Cijeungjing;
  4. Kecamatan Sadananya;
  5. Kecamatan Cimaragas;
  6. Kecamatan Panumbangan;
  7. Kecamatan Cihaurbeuti;
  8. Kecamatan Panjalu;
  9. Kecamatan Kawali;
  10. Kecamatan Cipaku;
  11. Kecamatan Panawangan;
  12. Kecamatan Jatinagara;
  13. Kecamatan Rancah;
  14. Kecamatan Cisaga;
  15. Kecamatan Tambaksari;
  16. Kecamatan Rajadesa;
  17. Kecamatan Sukadana;
  18. Kecamatan Banjarsari;
  19. Kecamatan Lakbok;
  20. Kecamatan Pamarican;
  21. Kecamatan Cidolog;
  22. Kecamatan Sindangkasih;
  23. Kecamatan Baregbeg;
  24. Kecamatan Sukamantri;
  25. Kecamatan Lumbung;
  26. Kecamatan Purwadadi; dan
  27. Kecamatan Banjaranyar.

### Pasal 3

- (1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dibentuk kelurahan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kelurahan Ciamis, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
  - b. Kelurahan Kertasari, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
  - c. Kelurahan Sindangrasa, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
  - d. Kelurahan Benteng, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
  - e. Kelurahan Maleber, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
  - f. Kelurahan Cigembor, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis; dan
  - g. Kelurahan Linggasari, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
    1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
      - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
      - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah.
    2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Perundang-Undangan;
      - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
      - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    3. Bagian Organisasi, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Kelembagaan;
      - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
      - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.

- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
    1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
      - b) Sub Bagian Bina Sarana Produksi; dan
      - c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD.
    2. Bagian Pembangunan, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
      - b) Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan; dan
      - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Pelayanan Sosial;
      - b) Sub Bagian Pengembangan Sosial; dan
      - c) Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.
  - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
    1. Bagian Keuangan, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Anggaran;
      - b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
      - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
    2. Bagian Umum, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Kesekretariatan;
      - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
      - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
    3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi;
      - b) Sub Bagian Protokol; dan
      - c) Sub Bagian Layanan Informasi.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Sekretariat DPRD

### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
- a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum dan Kesekretariatan, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Protokol dan Humas; dan
    3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan; dan
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - d. Bagian Rapat, Perundang-undangan, Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perundang-undangan;
    2. Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan
    3. Sub Bagian Penganggaran dan Pengawasan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Inspektorat

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
    2. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
    3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Dinas Pendidikan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.



- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan yang meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan yang meliputi bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
  - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahkan:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
  - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
    1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
    2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
  - g. UPT;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Dinas Kesehatan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; dan
    2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
    - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
    - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
  - e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
    - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
    - 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
    - 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
    - 2. Seksi SDM Kesehatan.
  - g. UPT;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
    1. Seksi Jalan dan Jembatan; dan
    2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya air, membawahkan:
    1. Seksi Irigasi; dan
    2. Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
  - e. Bidang Keciaptakarya, membawahkan:
    1. Seksi Penataan Bangunan;
    2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Drainase; dan
    3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
  - f. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahkan:
    1. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang;
    2. Seksi Pengendalian Ruang; dan
    3. Seksi Pertanahan.
  - g. UPT;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan lingkungan hidup.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan:
    1. Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
    2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
  - d. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan, membawahkan:
    1. Seksi Penanganan Persampahan;
    2. Seksi Pengembangan Persampahan; dan
    3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
  - e. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
    1. Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup;
    2. Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup; dan
    3. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan.
  - f. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
    1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
    2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

- g. Bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
    - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  - h. UPT;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedelapan Dinas Sosial

### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 24

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

#### Pasal 25

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial; dan
    - 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat.
  - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
    - 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas; dan
    - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan.
  - e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahkan:
    - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan
    - 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja, dan transmigrasi yang meliputi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja, dan transmigrasi yang meliputi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan:
    1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja; dan
    2. Seksi Pembinaan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
    1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
    2. Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  - e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
    1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
    2. Seksi Transmigrasi.
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB), keluarga sejahtera, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB), keluarga sejahtera, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
    - 2. Seksi Penyuluhan dan Penggerakan.
  - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
    - 1. Seksi Keluarga Berencana; dan
    - 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
    - 2. Seksi Perlindungan Anak; dan
    - 3. Seksi Pengarusutamaan Gender.
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian, dan pangan.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian, dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan:
    1. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
    2. Seksi Perlindungan, Pembiayaan dan Investasi; dan
    3. Seksi Lahan dan Irigasi.
  - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
    1. Seksi Serealia;
    2. Seksi Palawija; dan
    3. Seksi Perbenihan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
  - e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahkan:
    1. Seksi Produksi Hortikultura;

2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
  3. Seksi Perbenihan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura dan Perkebunan.
  - f. Bidang Penyuluhan, membawahkan:
    1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
    2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan; dan
    3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan.
  - g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
    1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    2. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
    3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
  - h. UPT;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keduabelas

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 36

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 37

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan *profile* kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan *profile* kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
    - 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
    - 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
    - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
    - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
    - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
    - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
  - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
    - 1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
    - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
  - g. UPT;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketigabelas Dinas Komunikasi dan Informatika

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 39

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang meliputi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian meliputi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahkan:
    1. Seksi Informasi Publik; dan
    2. Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi.
  - d. Bidang Persandian dan Telematika, membawahkan:
    1. Seksi Persandian; dan
    2. Seksi Telematika.
  - e. Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik, membawahkan:
    1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik; dan
    2. Seksi Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Data Statistik dan Data Elektronik;
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), membawahkan:
    - 1. Seksi Koperasi; dan
    - 2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
  - d. Bidang Industri, membawahkan:
    - 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH); dan
    - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA).
  - e. Bidang Perdagangan, membawahkan:
    - 1. Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen; dan
    - 2. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan.
  - f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
    - 2. Seksi Pengembangan Usaha Pasar.
  - g. UPT;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 45

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan unit pelayanan terpadu satu pintu serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal sesuai dengan lingkup tugasnya;



- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan:
    - 1. Seksi Verifikasi dan Penetapan; dan
    - 2. Seksi Dokumentasi dan Data.
  - d. Bidang Pengaduan dan Advokasi, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi; dan
    - 2. Seksi Advokasi dan Pelaporan.
  - e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi; dan
    - 2. Seksi Pengendalian dan Promosi.
  - f. UPT;
  - g. Tim Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keenambelas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 48

- (1) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan kepemudaan dan olahraga.

- (2) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang meliputi kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang meliputi kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
    1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
    2. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya; dan
    3. Seksi Pembinaan Kesenian.
  - d. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan, membawahkan:
    1. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
    2. Seksi Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.
  - e. Bidang Keolahragaan, membawahkan:
    1. Seksi Olahraga Pelajar dan Tenaga Keolahragaan; dan
    2. Seksi Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat.
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan yang meliputi pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan penggunaan arsip sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan yang meliputi pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan penggunaan arsip sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
    - 2. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan.
  - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahkan:
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan; dan
    - 2. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
  - e. Bidang Kearsipan, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan; dan
    - 2. Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapanbelas Dinas Peternakan dan Perikanan

##### Paragraf 1 Kedudukan

##### Pasal 54

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

##### Pasal 55

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan sebagian urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan sesuai yang diberikan kepada Daerah bidang tugasnya.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang peternakan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang peternakan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Produksi Prasarana dan Sarana Peternakan, membawahkan:
    - 1. Seksi Produksi Peternakan; dan
    - 2. Seksi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Peternakan.
  - d. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan:
    - 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
    - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan.
  - e. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan, membawahkan:
    - 1. Seksi Produksi Perikanan; dan
    - 2. Seksi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Perikanan.
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kesembilanbelas Satuan Polisi Pamong Praja

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 57

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
    1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan:
    1. Seksi Pencegahan; dan
    2. Seksi Pengendalian dan Penanganan Kebakaran.
  - g. UPT;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 60

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, membawahkan:
    - 1. Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa; dan
    - 2. Seksi Pemberdayaan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
  - d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
    - 1. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa; dan
    - 2. Seksi Pendapatan, Kekayaan, Sarana dan Prasarana Desa.
  - e. Bidang Pembangunan Desa, membawahkan:
    - 1. Seksi Fasilitas Pembangunan Desa; dan
    - 2. Seksi Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna.
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keduapuluh Satu Dinas Perhubungan

### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 63

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

#### Pasal 64

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Angkutan, membawahkan:
    1. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan
    2. Seksi Jaringan Transportasi.
  - d. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
    1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
    2. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas.
  - e. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan, membawahkan:
    1. Seksi Teknik Sarana; dan
    2. Seksi Teknik Keselamatan.
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Dua  
Dinas Pariwisata

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 66

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata; dan
    - 2. Seksi Pengelolaan Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata.
  - d. Bidang Pemasaran, membawahkan:
    - 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata; dan
    - 2. Seksi Data dan Informasi Pariwisata.
  - e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
    - 1. Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif; dan
    - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keduapuluh Tiga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 69

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya, membawahkan:
    1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
    2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
    3. Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban.
  - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
    1. Sub Bidang Perekonomian; dan
    2. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
  - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
    1. Sub Bidang Infrastruktur; dan
    2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
  - f. Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Data Perencanaan Pembangunan;
    2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
    3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- g. UPT;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedupuluh Empat  
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 72

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 73

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan, Penetapan dan Data PDRD, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Pendaftaran;
    2. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan; dan
    3. Sub Bidang Data dan Informasi.
  - d. Bidang Penagihan dan Pelaporan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Panagihan PDRD;
    2. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PDRD; dan
    3. Sub Bidang Pelaporan dan Fasilitasi Pendapatan Daerah.
  - e. Bidang Anggaran, membawahkan:
    1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah;
    2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Daerah; dan
    3. Sub Bidang Evaluasi Penyusunan Anggaran.
  - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
    2. Sub Bidang Akuntansi Aset; dan
    3. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.
  - g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
    1. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
    2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
    3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
  - h. UPT;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keduapuluh Lima

### Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 75

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 76

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 77

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. .
  - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian; dan
    2. Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN.
  - d. Bidang Pengembangan Karier, Mutasi dan Kepangkatan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi; dan
    2. Sub Bidang Kepangkatan.
  - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sertifikasi; dan
    2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial.
  - f. Bidang Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin Aparatur, membawahkan:
    1. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur; dan
    2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur.

- g. UPT;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedupuluh Enam Kecamatan

### Pasal 78

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

### Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas

### Pasal 79

- (1) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Perekonomian;
  - f. Seksi Pembangunan; dan
  - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - h. Kelurahan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Tujuh  
Kelurahan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 81

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 82

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam:
  - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat;
  - c. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas:
- a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Bagan susunan organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.

### BAB IV STAF AHLI

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 84

- (1) Staf Ahli adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan telaahan terkait permasalahan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 85

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 86

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 87

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas setiap Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kegiatan operasional diselenggarakan oleh setiap unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 88

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas setiap unit organisasi di bawahnya, pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian laporan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 89

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 90

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 91

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 92

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah dan Staf ahli yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pengisian pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPT pada dinas dan badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 94

Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005